

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank islam merupakan bank yang melaksanakan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam, dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antarapihak bank ataupun pihak lain untuk menyimpan dana ataupun pembiayaan Rkegiatan suatu usaha, dan juga kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariat islam. Sistem yang digunakan oleh bank islam yaitu sistem bagi hasil, system jual beli dan sewa (Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, 2007).

Istilah bank islam ini tidak dipakai oleh semua negara. Pada umumnya di Indonesia bankislam lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah, meskipun namanya berbeda dalam system perbankan syariah sama seperti bank islam yakni asas Islam. Lebih jelasnya, letak perbedaan antara bank islam dan bank konvensional secara kontemporer terletak pada ketiadaan bunga dalam perbankan islam dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dalam transaksi pada perbankan Islam .

Pada abad ke-20 bank islam merupakan tujuan dan kajian teoritis oleh akademisi baik dalam bidang ekonomi maupun hukum fiqih. Keinginan yang meyakinkan bahwa bank islam merupakan solusi dalam permasalahan ekonomi guna melahirkan kesejahteraan sosial, namun upaya yang mengimplementasikan secara praktis terhadap gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan perekonomian dunia yang tak dapat dipisahkan oleh bunga

Pada mulanya bank islam beroperasi pertama kali di Mesir pada tahun 1963 oleh *Mit Ghamr local saving bank* yang menjadi tombak sejarah perkembangan

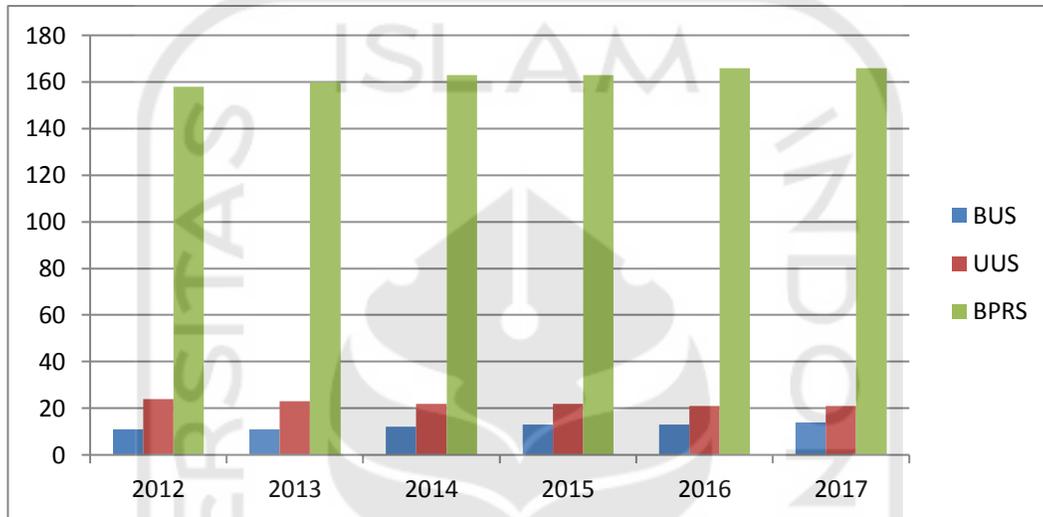
perbankan dengan sistem islam. Tonggak sejarah lainnya berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1970 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), lalu pada tahun 1975 IDB resmi didirikan setahun berbarengan dengan kelahiran *Dubai Islamic Bank* di Uni Emirate Arab. Berdirinya IDB berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bank islam di timur tengah dan tidak memungkiri berdampak positif terhadap perkembangan lahirnya bank islam di Asia Tenggara.

Ditarik dari kesimpulan sejarah yang ada berkembangnya bank islam masihlah amat muda bahkan dikatakan seumur jagung. Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan perbankan konvensional yang berumur lebih dari 100 tahun. Hal ini mempengaruhi pemodalan perbankan yang dimana tentu saja dari segi pemodalan bank konvensional lah yang lebih unggul. Jika melihat presentase pendapatan antara bank islam dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan yang mencolok.

Ernest and Young World Islamic Banking Competitiveness Report (2012-2013) menyimpulkan data menarik di Asia Tenggara, bahwasannya perbandingan bank islam dan bank konvensional pada data tersebut *Return On Equity* (ROE) Bank konvensional sebesar 19%. Sedangkan perbankan islam mencapai 14%. Kemudian *Return On Asset* (ROA) konvensional tahun 2011 meraih poin sebesar 1,8% dan 1,1% yang dimiliki oleh perbankan islam. Profitabilitas dan liquiditas kinerja keuangan bank islam lebih baik dibanding bank konvensional dilihat dari rasio pemodala (CAR) dan rasio rentabilitas (ROA). (Muchlish & Umardani, 2016)

Indonesia mempunyai dua jenis perbankan, adanya perbankan konvensional dan perbankan syariah saat ini, Bank konvensional perbankan dengan sistem disepakati bersama melalui sistem konvensi. Sedangkan perbankan syariah memilikisuatu sistem yang dikembangkan melalui dasar – dasar prinsip syariah. Adapun perkembangan perbankan syariah cukup terlihat signifikan pada tahun 2012-2017.

Grafik 1.1. Perkembangan Bank Syariah Indonesia



Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan Bank Syariah di Indonesia sangat signifikan dilihat pada tahun 2012-2017. Pada tahun 2016 jumlah indikasi BUS sebanyak 13, UUS sebanyak 21 dan BPRS sebanyak 164, penurunan pada UUS disebabkan karena beberapa unit usaha syariah (UUS) telah berubah menjadi bank umum syariah, kemudian sama dengan Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga terus mengalami peningkatan.

Oleh karena itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilihat memiliki potensi yang cukup besar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. BPRS merupakan bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya, BPRS melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam pasal 27 dan Pasal 28 SK DIR BI 32/36/1999. Karena dalam hal ini BPRS memiliki kegiatan operasional lebih terbatas seperti, tidak di izinkannya untuk

menerima dana simpanan dalam bentuk giro dan dilarangnya melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal dan melakukan usaha peran asuransi.

Walaupun memiliki pembatasan kegiatan operasional tersebut, tidak selalu membuat BPRS tersingkir dari persaingan Bank Umum Syariah, keberadaan BPRS diantara Bank Umum Syariah sangat diperlukan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas pada sektor riil, khususnya bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga diharapkan dengan adanya BPRS di tengah-tengah masyarakat dapat tercapai pertumbuhan yang merata dalam

Adapun data dari Bank Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta Triwulan III (Maret, 2015) jumlah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari 53 unit dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdiri dari 11 unit. Berikut merupakan perkembangan BPRS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data tersebut dirincikan dalam sebuah penjelasan grafik dibawah ini sebagai berikut:

Grafik 1.2. Perkembangan BPR dan BPRS di Yogyakarta



Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Dari tabel diatas merupakan perkembangan BPRS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari tahun 2012-2016 jumlah BPR Konvensional yaitu 53 Unit sedangkan untuk jumlah BPRS berjumlah 11 Unit. OJK melihat pertumbuhan pembiayaan BPRS lebih besar daripada kredit BPR yang ada di Yogyakarta serta menyebabkan masyarakat lebih memilih pembiayaan BPRS ketimbang melalui kredit BPR Konvensional. Hal ini bisa dilihat dari data pertumbuhan pembiayaan yang dikururkan oleh BPRS selama periode Januari - Desember 2016 meningkat 14,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam upaya mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka perlu adanya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui peningkatan efisiensi bank. Pesatnya perkembangan industri perbankan di Indonesia menjadikan pengukuran tingkat efisiensi semakin dibutuhkan. Salah satu indikator tingkat efisiensi bank dapat dilihat dari rasio antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perbankan dapat dikatakan efisien apabila rasio BOPO mengalami penurunan. Namun mengingat industri perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan banyak input dan output, maka pengukuran tingkat efisiensi menggunakan rasio BOPO dianggap tidak menggambarkan tingkat efisiensi suatu bank. Hal tersebut dikarenakan perhitungan tingkat efisiensi menggunakan rasio BOPO merupakan *Partial Efficiency* (Firdaus dan Muhammad, 2013).

Pendekatan lain yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi dengan mempertimbangkan banyaknya input dan output yang digunakan oleh bank yaitu melalui pendekatan parametric diantaranya *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA), dan *Distribution Free Approach* (DFA). Kedua, melalui pendekatan non parametric diantaranya *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposable Hull* (Fadhullah, 2015).

Sampai saat ini penelitian mengenai tingkat efisiensi bank terus mengalami perkembangan di berbagai negara mengingat efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah di Indonesia masih kalah efisien, hal ini dikarenakan perbankan syariah masih dalam tahap ekspansi dan belum mencapai skala ekonomi seperti halnya bank konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh Firdaus dan Muhammad (2013) dalam penelitiannya yang mengungkapkan tingkat efisiensi bank syariah di Indonesia belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Sementara itu Fadhullah (2015) melakukan penelitian dengan mengambil studi kasus pada bank BPD Syariah di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan bahwa selama periode 2008 sampai 2012 tidak terdapat BPD Syariah yang mencapai efisiensi sampai 100 persen. Disamping BUS dan BPD Syariah yang turut menjadi perhatian adalah bagaimana tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) terus didorong untuk mengembangkan usahanya karena peran BPRS yang begitu penting terhadap pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan obyek pembiayaan BPRS untuk menggerakkan perekonomian sektor riil khususnya di Yogyakarta dimana masyarakatnya dari tahun 2016 memiliki ketertarikan positif terhadap BPRS ditandai dengan meningkatnya pembiayaan total aktiva perbankan tersebut.

Suatu bank dikatakan efisien ketika bank mampu mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mampu mencapai tingkat output tertentu dengan input yang minimum. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan di atas, masih perlu dilakukan pengujian kembali mengenai tingkat efisiensi dan determinan dari efisiensi khususnya untuk BPRS, mengingat BPRS memiliki peran penting bagi pengembangan UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Kajian Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dengan Studi Kasus BPRS di Yogyakarta.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu malakukan penelitian dengan menganalisis kinerja BPRS di Yogyakarta dan dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi BPRS diYogyakarta?
2. Bagaimana langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh BPRS agar mencapai efisien?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul di atas pembahasan masalah mengenai efisiensi perbankan umum syariah di Indonesia sangatlah luas maka penelitian hanya dibatasi menjadi :

1. Hanya meneliti yang berkaitan dengan beberapa variabel input dan output perbankan umum syariah.
2. Hanya meneliti data sekunder yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal delapan BPRS di Yogyakarta.
3. Hanya meneliti data BPRS yang terupdate pada periode tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara garis besar, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPRS Syariah di Yogyakarta dengan parameter tingkat efisiensi. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Melihat seberapa besar tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Yogyakarta.
2. Mengupayakan langkah-langkah perbaikan apa yang bisa dilakukan agar BPRS dapat efisien dengan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1 Manfaat bagi peneliti

Penulis berharap penelitian ini mampu dijadikan rujukan informasi, masukan, serta bahan evaluasi bagi penulis dimasa yang akan mendatang. Guna pembelajaran terkait perkembangan informasi dan kemajuan serta pengenalan calon praktisi perbankan syariah kedepannya.

2 Manfaat bagi orang lain

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang akan memberikan gambaran bagaimana kondisi efisiensi perbankan umum syariah di Indonesia terkait faktor-faktor apa saja yang turut menentukan tingkat efisiensi perbankan umum syariah.

3 Manfaat bagi pemerintah

Penulis berharap hasil penelitian ini untuk para pemangku kebijakan khususnya pemerintah dapat menjadi masukan guna mengidentifikasi dan bahan acuan pada kiat kiat kebijakan yang meminimalisir unefisiensi perbankan umum syariah agar kebijakan yang dibuat lebih konstruktif dan penanganan kebijakan inefisiensi perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi mengenai aspek penulisan penelitian yang menyajikan tentang latar permasalahan yang melatar belakangi efisiensi, rumusan rumusan efisiensi, tujuandiadaknya nya penelitian, manfaat terhadap penelitian, dan penjelasan sistematis penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan mengenai kajian pustaka, landasan teori, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi tentang penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Landasan teori berisikan tentang teori apa saja yang peneliti gunakan untuk mendekati permasalahan. Hipotesis yang disusun untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang kualifikasi jenis dan rekam jejak data yang diperoleh, cara sistematis pengumpulan data, identifikasi faktor-faktor variabel yang berkaitan, serta model analisis yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil deskriptif data, pengujian hipotesis yang dibuat, serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian pada BAB IV dan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.